

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Riset ini bertujuan untuk menjelaskan dukungan Vanuatu terhadap pembebasan Papua Barat dalam kajian konstruktivisme. Ini dianggap penting untuk dikaji karena pendekatan konstruktivisme memiliki peran penting dalam dukungan Vanuatu terhadap pembebasan Papua Barat. Hal yang menarik pada tulisan ini karena memiliki kebaruan dalam hal pendekatan yang menggunakan pendekatan kontemporer dalam hubungan internasional yaitu konstruktivisme. Teori konstruktivisme menurut Alexander Wendt dalam konsep identitas negara dan kepentingan nasional akan mengungkapkan misteri di balik dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat. Dengan demikian maka diyakini bahwa tulisan ini akan memberikan kontribusi besar terkait dukungan negara Vanuatu terhadap pembebasan Papua Barat pada studi hubungan internasional.

Indonesia terdiri atas tiga puluh empat provinsi, di antaranya Provinsi Papua yang beribukota di Jayapura dan Provinsi Papua Barat yang beribukota di Manokwari. Kedua provinsi ini dahulunya diberi nama Irian Jaya setelah integrasi resminya ke dalam Republik Indonesia pada tahun 1962, namun pada tahun 2001 Presiden Abdurrahman Wahid mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua dan kemudian dilakukan pemekaran provinsi Papua Barat pada tahun 2007 (Komnas HAM, 2003). Untuk membedakan dua provinsi tersebut dengan sebutan dunia internasional, skripsi ini akan menyebut wilayah tersebut sebagai Papua Barat.

Papua Barat merupakan wilayah rawan konflik antara aparat keamanan dan sipil yang disebabkan oleh pemisahan Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan *Koreri* pada tahun 1942 menjadi titik awal bagi masyarakat Papua untuk memperjuangkan nasibnya sendiri dan berharap dapat menyatukan seluruh suku dan klan Melanesia menjadi satu pandangan nasionalisme Papua Barat. Perjalanan penentuan nasib sendiri bangsa Papua telah memasuki babak baru seiring dengan persiapan Republik Indonesia untuk merdeka. pertemuan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) kedua untuk membahas kepastian status Papua Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia menjadi topik perdebatan keras di antara para pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia saat itu (Drooglever, 2010).

Menurut pandangan Ir. Soekarno bahwa secara strategi politik Indonesia, wilayah yang merupakan bekas koloni hindia belanda yang mana dari Sabang sampai Merauke adalah bagian dari negara Indonesia. Bagi Soekarno ditilik dari sisi historis Papua Barat masuk bagian dari kerajaan Majapahit dan disisi lain Soekarno dan Muzakar juga sangat terpukau dengan kekayaan alam Papua Barat. Namun pendapat Soekarno ini tidak sejalan dengan pandangan Moh. Hatta, menurutnya pandangan Soekarno dengan yang lain merupakan pandangan kolonial. Bagi Hatta, Papua Barat adalah bangsa Melanesia yang berbeda dengan bangsa Melayu yang mendiami sebagian besar wilayah Indonesia, perkara Papua Barat ikut dengan Indonesia dapat diserahkan kembali pada keputusan bangsa Papua sendiri (Drooglever, 2010).

Pada 27 Desember 1945 setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda dengan resmi mengakui kedaulatan Indonesia, akan tetapi berbeda dengan Papua Barat yang secara administratif berada di bawah koloni Belanda. Tak lama sejak kemerdekaan bangsa Indonesia, Belanda berkeinginan besar untuk memberikan hak kedaulatan bagi rakyat Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri. Menanggapi hal itu kaum intelektual Papua Barat yang dipersiapkan Belanda, Nicolaas Jouwe, Markus Kaisepo, P. Torey dan kawan-kawan untuk merencanakan penentuan nasib sendiri melalui *Nieuw Guinea Road* untuk menggagalkan pembangunan Papua Barat kepada Indonesia dan membentuk komite nasional untuk membahas simbol negara. Sementara di samping itu Belanda semakin mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat dengan memberikan program pembangunan bukan semata-mata administrasi publik, tetapi mencakup segala macam tindakan dan program baik bidang pertanian, kesehatan, infrastruktur, dan juga memberikan pendidikan. Oleh sebab itu Pemerintahan Belanda di Papua Barat dianggap bukanlah suatu pemerintahan kolonial tetapi suatu usaha modernisasi paska perang dalam suatu pemerintahan pembangunan (Visser, 2012).

Pada 1 Desember 1961, bendera nasional Papua Barat, Bintang Kejora berkibar sejajar dengan bendera Belanda dengan lagu kebangsaan 'Hai Tanahku Papua' dinyanyikan didepan kerajaan Belanda. Peristiwa itu terdengar cepat sampai ke pusat pemerintahan Indonesia. Melalui pidato Tri Komando Rakyat yang digelorakan oleh Presiden Ir. Soekarno di Yogyakarta pada 19 Desember 1961 untuk merebut kembali Papua Barat ke pangkuan Indonesia dari rencana pembentukan negara boneka oleh Belanda (Drooglever, 2010).

Pada awal tahun 1962, pasukan Indonesia mulai melakukan operasi pembebasan Papua Barat. Di tengah memanasnya konflik antara Indonesia dan Belanda, Amerika Serikat datang dengan menawarkan usulan mengenai penyelesaian persoalan Papua Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Pigay, 2000). Kemudian usulan Amerika Serikat itu ditindaklanjuti dengan perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 yang kemudian disepakati oleh Amerika dan Belanda. Kesepakatan yang tertulis dalam perjanjian tersebut berisikan: “ pertama, Belanda menyerahkan tanggung jawab administratif pemerintahan Irian Barat kepada PBB melalui *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA). Kedua, Terhitung 1 Mei 1962, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Ketiga, pada akhir 1969, di bawah pengawasan PBB, dilakukan *Act of Free Choice* atau Pepera bagi rakyat Papua Barat untuk dapat menentukan nasib sendiri” (United Nations , 1962).

Act free Choice yang diberikan kepada rakyat Papua melalui Penentuan Pendapat Rakyat mengkaidahkan satu orang untuk satu suara, namun kenyataanya peristiwa ini hanya diwakilkan oleh 1.025 yang tidak melibatkan masyarakat Papua yang secara keseluruhan. Bagi rakyat Papua Barat hingga hari ini Pepera dianggap sebagai bentuk manipulasi pemerintah Indonesia untuk merebut kembali Papua Barat dari tangan Belanda. Di sisi lain, Indonesia beralasan sistem satu orang satu suara tidak cocok dengan budaya Indonesia yang menganut asas musyawarah untuk mufakat berdasarkan Pancasila (Drooglever, 2010).

Hadirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) sejak tahun 1963 merupakan bentuk ketidakpuasan rakyat Papua Barat dengan kebijakan Indonesia selama terintegrasi dengan Indonesia. OPM merupakan istilah yang dilabeli oleh pemerintah Indonesia kepada gerakan separatis di Papua Barat. Gerakan tersebut terdiri daripada tiga unsur, pertama unit-unit bersenjata tanpa adanya seorang panglima. Kedua, kumpulan yang mengadakan demonstrasi dan bantahan di wilayah tersebut. Dan terakhir, sekumpulan kecil pejabat-pejabat yang berpusat di luar negara yang berusaha meraih sokongan antarbangsa untuk kemerdekaan (Drooglever, 2010).

Organisasi Papua Merdeka awalnya merupakan reaksi masyarakat Papua terhadap sikap pejabat-pejabat Indonesia yang mengecewakan mereka. Hingga saat ini, di mata pemerintah Indonesia, proses integrasi Papua Barat pada Indonesia merupakan kehendak sejarah dan panggilan jiwa patriotisme sukarelawan meskipun sebenarnya masyarakat asli Papua sendiri tidak pernah ikut serta dalam proses perjalanan sejarah Indonesia. Kekuatan OPM selalu dikampanyekan sebagai ancaman serius bagi pemerintah Indonesia. Keinginan ini berawal dari pandangan bahwa gerakan untuk mengakui identitas politik Papua Barat merupakan masalah bom waktu yang diwariskan oleh Belanda, bukan permasalahan yang berakar dari rasa ketidakadilan dan harga diri orang Papua. Oleh karena itu memusnahkan kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua Barat adalah solusi dari kebijakan yang diambil pemerintah untuk menghancurkan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka dengan melakukan berbagai operasi-operasi militer secara berkesinambungan yang dilakukan sejak peristiwa Pepera 1969 (Chauvel & Bhakti, 2004)

Dr. Benny Giay adalah seorang rohaniawan Papua, ia salah satu orang Papua yang diincar sebagai anggota kelompok separatis. Dalam wawancaranya dengan salah satu media televisi Indonesia, dirinya mengatakan bahwa pengalaman dibawah pengaruh aparat militer Indonesia merupakan pengalaman pahit baginya yang tidak pernah terlupakan bagi seluruh orang-orang Papua pada masa itu. Orang Papua merasa diperlakukan bukan layaknya sebagai seorang manusia yang memiliki hak hidup tetapi menjadi objek kekerasan dari aparat militer. Sejarah orang Papua sebagai objek kekerasan itulah yang selalu diingkari oleh pemerintah Indonesia sampai pada saat ini. Pihak-pihak aparat keamanan di Papua Barat merasa apa yang dilakukan oleh mereka bukanlah suatu tindakan kejahatan terhadap orang Papua, karena telah menghancurkan, memusnahkan, memperkosa, penangkapan serta pembunuhan dengan segala bentuknya di Papua Barat adalah sebagai tugas untuk melindungi keutuhan negara Indonesia dari organisasi separatisme yang mereka sebut OPM (Giyai, 2000).

Ketika label separatis telah diberikan oleh militer terhadap seseorang di Papua Barat, maka orang tersebut menjadi target oleh militer baik menjadi korban penculikan, penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan dan berbagai kekerasan lainnya. Menurut Benny Giay, aksi ini berlangsung bertahun-tahun sejak Pepera, dengan ribuan korban jiwa. Setelah memasuki era reformasi keluarga-keluarga korban kekerasan, tokoh-tokoh intelektual, dan kalangan terpelajar mulai menuntut pemerintah Indonesia untuk mempertanggungjawabkan semua perlakuan tidak manusiawi itu. Sebagai permintaan untuk pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, wacana hak asasi manusia menjadi isu paling dominan di Papua Barat (Giyai, 2000).

Kontrol militer yang meningkat atas kehidupan sosial dan politik Papua Barat juga tidak terlepas dari potensi ekonomi yang sangat besar. Inilah yang dilihat perusahaan asing ketika masuk di Papua Barat, yakni PT Freeport yang mulai menanamkan modalnya di wilayah Timika. Militer mulai memberikan pengaruh yang lebih kuat dalam politik lokal untuk melindungi PT Freeport (Al Rahab, 2016). Selain itu, militer telah memperluas kekuasaannya dengan memposisikan diri sebagai pelindung untuk masuknya ribuan transmigrasi dari luar Papua Barat. Semua ini dianggap sebagai tanggung jawab nasional oleh pejabat militer untuk menjaga integritas wilayah Indonesia di Papua Barat. Menanggapi eskalasi tuntutan 'kemerdekaan' yang semakin didengungkan oleh masyarakat Papua Barat saat itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan produk kebijakan Tentang Otonomi Khusus Papua Barat pada tahun 2001 (Drooglever, 2010).

Namun undang-undang ini tidak serta merta diterima oleh sebagian besar masyarakat Papua Barat karena mereka percaya bahwa otonomi khusus merupakan tahap kedua dari Pepera 1969. Bahkan sejak undang-undang Otsus diundangkan, belum ada perubahan besar dalam kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Dalam mengkaji undang-undang Otsus ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat belum sepenuhnya menunjukkan rasa keadilan, kesejahteraan rakyat, dan penegakan hukum juga tidak sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, terutama hak-hak Orang Asli Papua. Ada kecenderungan menganggap bahwa Otsus hanya untuk kesejahteraan dan kekayaan pejabat Papua Barat dan pejabat Jakarta, sehingga Otsus identik dengan uang

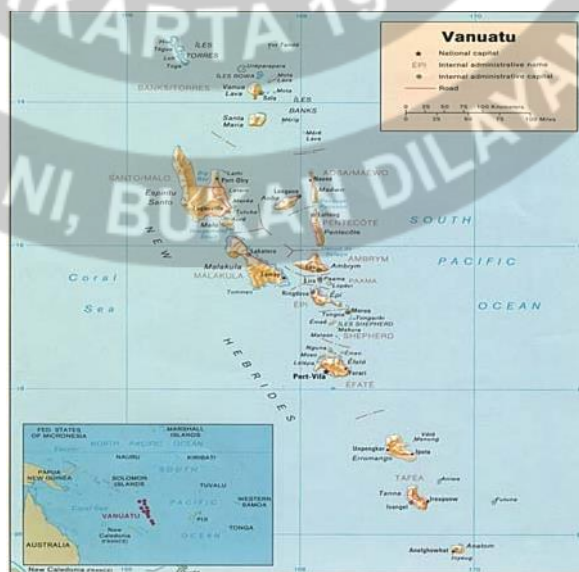
banyak tetapi tidak menyelesaikan esensi masalah dan kesejahteraan rakyat Papua Barat.

Oleh sebab itu sebagai upaya untuk melobi persoalan ini kepada pemerintah maka dibentuknya tim seratus pada Kongres Rakyat Papua pertama pada tahun 1999 yang bermaksud untuk bertemu langsung dan berdialog bersama Presiden B.J Habibi dengan kelompok pro kemerdekaan dalam membahas pemisahan Papua Barat dari Indonesia. Selain itu pada kongres ini menghasilkan permintaan agar Dewan Keamanan PBB juga dilibatkan sebagai penjaga ketertiban dan perdamaian dunia termasuk menjaga dan memelihara keamanan di Papua Barat. Namun pada pertemuan Kongres Kedua pada tahun 2000 pemerintah membatasi pertemuan ini karena dialog yang diinginkan mengarah pada pemisahan diri dari Indonesia yang ditentang oleh pemerintah pusat (LIPI, 2008).

Lobi internasional untuk kelompok-kelompok independen dalam upaya pemisahan Papua Barat mulai dilakukan baik secara bilateral antarnegara maupun antarforum regional dan internasional seperti PBB, *Pacific Island Forum* (PIF) dan *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dan lembaga swadaya masyarakat. Dukungan datang dari eksternal yang dilakukan dengan membuka kantor perwakilan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP), sehingga beberapa negara di Pasifik Selatan mendukung gerakan kemerdekaan Papua Barat. Dukungan ini adalah upaya untuk mendapatkan perhatian internasional melalui perwakilan asing yang mendukung kemerdekaan Papua Barat. Beberapa isu yang sering disinggung pada pertemuan forum ini adalah sejarah politik Papua Barat, legalitas Pepera, isu HAM, peran dan dominasi militer di Papua Barat, ketidakadilan sosial dan ekonomi orang Papua serta diskriminasi rasial (Balades, 2020).

Dukungan kemerdekaan Papua Barat secara tegas diberikan oleh beberapa negara di Pasifik Selatan. Negara-negara Pasifik yang menyatakan dukungannya terhadap pembebasan Papua Barat dalam KTT Millenium PBB pada September 2000 di antaranya Kepulauan Cook, Nauru, Tuvalu, dan Vanuatu. Namun dukungan tersebut tidak bersifat konstan, atau cenderung fluktuatif bergantung pada siapa pemimpin negara yang sedang berkuasa pada saat tertentu. Namun berbeda dengan Vanuatu yang secara konsisten mendukung pembebasan Papua Barat. Keinginan besar Papua Barat untuk lepas dari pangkuan Indonesia didukung penuh sejak awal pembentukan Negara Vanuatu meskipun juga didukung oleh beberapa negara di Pasifik Selatan lainnya meskipun dukungan yang diberikan dalam kapasitas yang terbatas. Konsistensi dukungan yang diberikan oleh Vanuatu kepada Papua Barat didasari atas kedekatan geografis, etnis Melanesia dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang membuat Vanuatu vokal untuk membela Papua Barat (Elisabeth, 2021)

Gambar 1.1. Peta Negara Vanuatu



Sumber: The University of Texas at Austin, 2016

Republik Vanuatu adalah sebuah negara di Samudera Pasifik Selatan beribukota di Port-Vila yang hanya memiliki luas wilayah 12,189 km² dan terdiri dari 80 pulau. Sebagian besar dari pulau-pulau ini berpenghuni, setengahnya bergunung-gunung dan berhutan lebat dengan lahan pertanian sempit di pesisir. Vanuatu terletak di sebelah timur Australia, barat Fiji dan selatan Kepulauan Solomon. Dengan jumlah penduduk 303.009 ribu jiwa pada Juli 2021. Mayoritas mata pencaharian penduduk Vanuatu adalah berbasis pertanian. Sekitar 65 persen tenaga kerja Vanuatu mencari nafkah di sektor pertanian, biasanya dari pertanian skala kecil. Ekspor utama adalah kopra (daging kelapa kering), minyak kelapa, kakao, kopi, akar kava, daging sapi dan kayu. Sayangnya ekonomi Vanuatu tidak dapat tumbuh cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan populasinya yang terus bertambah. Sedangkan tingkat buta huruf sangat bervariasi antardesa. Terutama kaum perempuan, hanya berbicara bahasa lokalnya dan oleh karena itu tidak dapat berkomunikasi di luar kelompok bahasa lokalnya (World Vision, 2015)

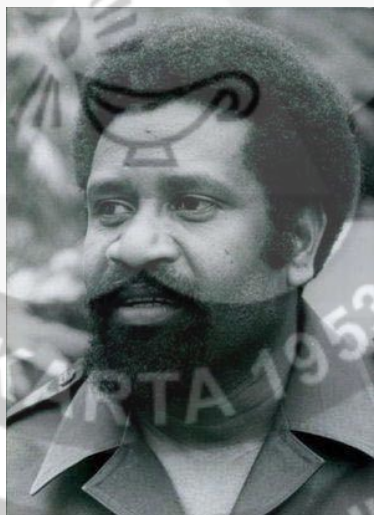
Gambar 1.2 Peta Melanesia



Sumber: Oceania UN Geoscheme, 2014

Penduduk asli Vanuatu berasal dari etnis Melanesia, satu rumpun dengan orang-orang Papua di Indonesia, Papua Nugini, Aborigin, Australia, sebagian warga Timor Leste serta masyarakat di kawasan Asia Pasifik Selatan lainnya seperti Fiji, Solomon Island, New Caledonia, hingga Samoa. Sebutan Melanesia pertama kali digunakan pada abad ke-19 oleh penjajahan Eropa sebagai rujukan untuk menanamkan sebuah kelompok etnis dan penggolongan pulau-pulau Pasifik dan sekitarnya. Namun kini klasifikasi dengan sudut pandang rasial dianggap tidak tepat sehingga Melanesia hanya dipakai dalam konteks geografis saja (World Vision, 2015).

Gambar 1.3. Perdana Menteri Vanuatu Walter H. Lini



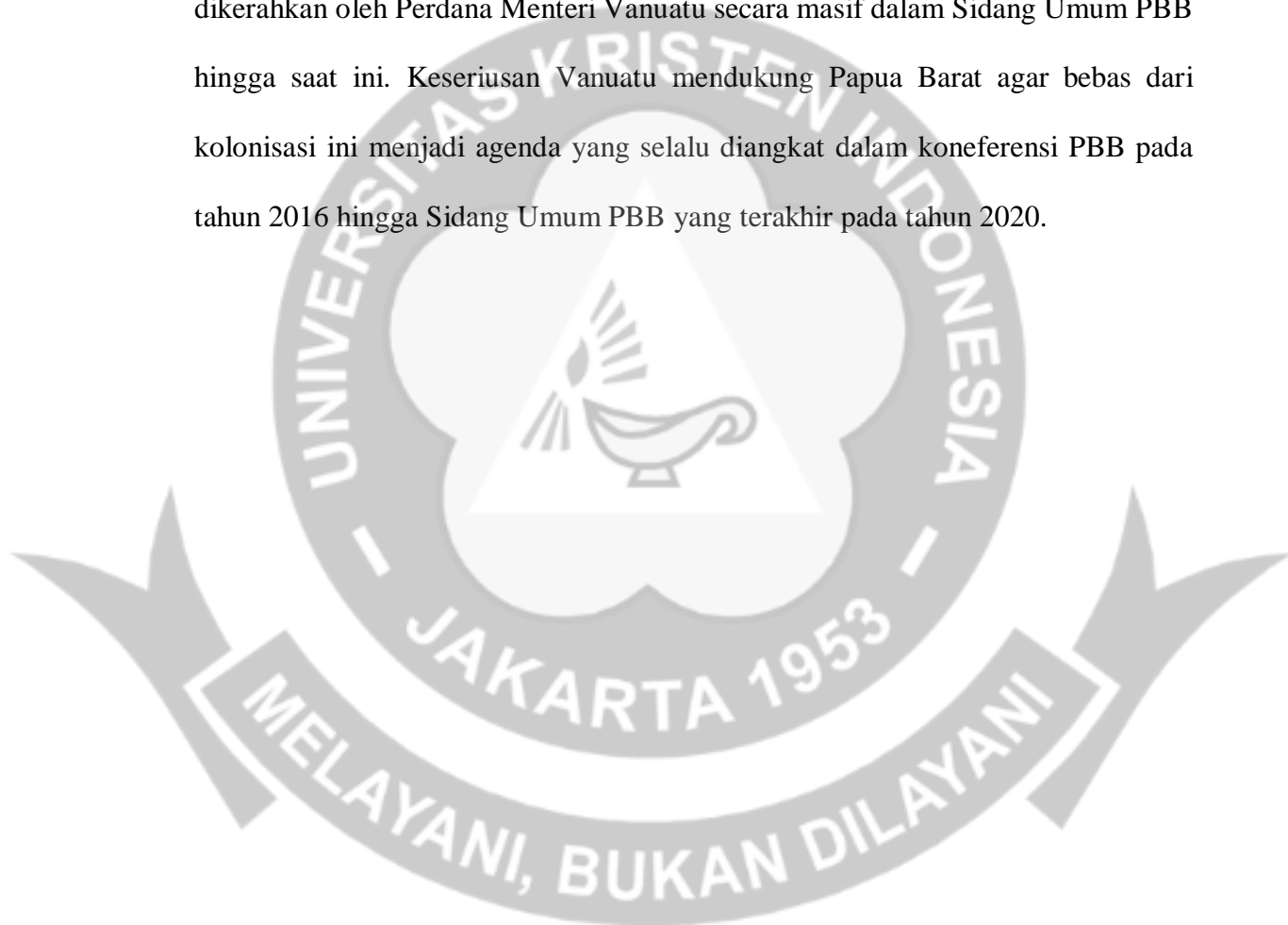
sumber: dailypost, 2021

Perdana Menteri Vanuatu Walter Lini (1980-1991) adalah pemimpin Vanuatu pertama yang menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua Barat Baginya, kemerdekaan Vanuatu belumlah sempurna hingga seluruh wilayah dan bangsa Melanesia terbebas dari kolonialisme. Inilah asal-muasal dan alasan Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua Barat sejak awal. Dengan diperkuat dukungan dari Bernard Narokobi menyebut bahwa “Melanesia terdiri dari Papua Barat, Papua Nugini, Kepulauan Salomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, juga Fiji”.

Dengan dasar inilah membuat Vanuatu terus mendorong Papua Barat untuk merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Narokobi, 1983)

Hingga saat ini Vanuatu tidak jarang membawa masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di forum-forum internasional. Pada level sub regional Vanuatu menyatakan dukungan terhadap Papua Barat dengan memboikot delegasinya di *Melanesian Spearhead Group* (MSG) supaya dapat bertemu dengan kelompok perwakilan kemerdekaan Papua Barat pada 16 Januari 2014 dan membuka kantor perwakilan rakyat Papua Barat di Vanuatu. MSG adalah organisasi regional di kawasan Pasifik Selatan yang beranggotakan negara-negara berlatar belakang etnis Melanesia dan yang paling sering membahas isu kemerdekaan Papua Barat. Namun jika mengikuti dinamika MSG, kebijakan yang dikeluarkan selalu berubah-ubah dalam menyikapi isu Papua Barat. Tidak adanya konsistensi dalam Forum MSG disebabkan karena tidak adanya kesatuan visi pada anggotanya. Dukungan Vanuatu untuk terus menyuarakan dekolonisasi dan isu hak asasi manusia di Papua Barat dalam setiap KTT MSG menunjukkan bahwa Vanuatu cenderung kontra terhadap Indonesia. Meskipun dalam forum regional tidak menghasilkan satu suara oleh negara-negara Pasifik Selatan, dukungan Vanuatu untuk menyuarakan persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dalam forum internasional terus dilakukan hingga beberapa dekade berturut-turut.

Pada tahun 2016 menjadi titik awal bagi Vanuatu dalam mengomentari dan mengkritik Indonesia di Sidang Umum PBB. Bermula dari Sidang Umum PBB ke-71 tahun 2016 Vanuatu dan negara-negara Pasifik berpidato mengenai bagaimana Indonesia telah melanggar hak asasi manusia masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dukungan Vanuatu untuk menyuarakan isu terkait Papua selalu dikerahkan oleh Perdana Menteri Vanuatu secara masif dalam Sidang Umum PBB hingga saat ini. Keseriusan Vanuatu mendukung Papua Barat agar bebas dari kolonisasi ini menjadi agenda yang selalu diangkat dalam konferensi PBB pada tahun 2016 hingga Sidang Umum PBB yang terakhir pada tahun 2020.



1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut. **Bagaimana Vanuatu memberi dukungannya terhadap Penentuan Nasib Sendiri Papua Barat dari tahun 2014-2020 ?**

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk memahami proses Vanuatu memberi dukungannya terhadap penentuan nasib sendiri Papua Barat dari tahun 2014-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai maka hasil dari temuan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para akademisi hubungan internasional dan praktisi hubungan internasional. Manfaat akademis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pada dunia akademisi untuk kepentingan kajian selanjutnya. Sehingga, penelitian ini memberikan sumbangan dalam mengembangkan kajian ilmu hubungan internasional terutama kajian teoritis mengenai konstruktivisme dalam memahami dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat. Riset ini dapat memberikan manfaat teoritis dalam hubungan internasional dalam menganalisis dukungan Vanuatu untuk mendukung perjuangan Papua Barat dalam mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Indonesia di Papua Barat.

Manfaat praktis yang terkandung ialah untuk menjadi bahan bacaan dan rujukan dalam memahami Vanuatu dan anggota forum Kepulauan Pasifik yang kontra terhadap Indonesia ketika menyingung isu hak asasi manusia di forum regional atau internasional. Di samping itu penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai pelanggaran-pelanggaran hak asasi

manusia di Papua Barat. Penelitian ini juga mampu memberi manfaat kepada masyarakat agar dapat mengevaluasi peran pemerintah terutama untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang terjadi hingga sekarang di Papua Barat.

1.5. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Proses penelitian memerlukan korelasi yang tepat dengan penggunaan metode penelitian agar mendapatkan fakta-fakta yang mendukung alur pemikiran, gagasan teori hingga mencapai hasil akhir yang sesuai dengan tujuan (Sugiyono, 2006). Mengartikan metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah suatu prosedur untuk mengetahui suatu langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan fakta-fakta baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-hal baru. Metode penelitian pada umumnya terbagi menjadi 3 (tiga), yakni kualitatif, kuantitatif, dan gabungan. Menurut Moleong metode penelitian kualitatif adalah,

“Metode penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti”
(Moleong, 2005).

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini akan meneliti kondisi objek secara alamiah dengan melihat dukungan-dukungan terhadap penentuan nasib sendiri Papua Barat. Dukungan tersebut adalah bentuk gejala fenomena sosial yang dapat diteliti. Peneliti ingin menemukan pola-pola yang menjadi latar belakang kondisi tersebut.

1.5.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sebagaimana definisi yang disampaikan oleh Bogdan & Biklen, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, akan tetapi pemaknannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentatif (Bogdan & Biklen, 1992).

Penelitian berbasis studi kasus dipakai untuk mendapatkan pemahaman lebih tentang kasus kemerdekaan Papua Barat yang didukung oleh negara-negara Pasifik terkhusus Vanuatu. Menurut Kumar, penelitian dalam studi kasus akan memberikan hasil analisis yang intensif dalam meneliti fenomena sosial yang ada (Kumar, 1999). Kemudian memaparkan studi kasus sebagai metode penelitian yang memiliki tujuan penting dalam kasus yang diteliti, di mana kasus tersebut menjadi

penyebab mengapa penelitian dilakukan. Karena itulah dalam penelitian studi kasus perlu dilakukan penggalian informasi dan analisis mendalam mengenai segala hal yang berkaitan dengan kasus (Stake, 2006).

Tipe penelitian yang digunakan pada skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata penelitian deskriptif merupakan karakteristik dari penelitian yang dapat mengungkapkan berbagai fenomena sosial dan alam dalam kehidupan masyarakat secara spesifik (Sukmadinata, 2007). Mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memotret fenomena individual, situasi atau kelompok yang terjadi baru-baru ini. Didasarkan atas paparan para ahli dengan menggunakan jenis dan tipe penelitian ini diharapkan dapat mengarahkan peneliti lebih dalam untuk menggali terkait studi kasus tersebut sehingga jelas antara fenomena yang diteliti dan konteks penelitian.

1.5.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data penelitian dapat dicari dari berbagai sumber yang ada. Menurut Nur Indrianto sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka (Indriantoro & Supomo, 2013). Secara umum, sumber data dikategorikan menjadi dua, ialah sumber primer dan sumber sekunder. Dalam tulisan Husein Umar mengatakan bahwa sumber primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan. Data yang dihasilkan dari pencarian sumber data primer meliputi, dokumen historis dan legal, hasil dari suatu eksperimen, hasil statistik, data statistik, objek-objek seni, dan lembaran-lembaran penulisan kreatif (Umar, 2013).

Sedangkan, menurut Nur Indrianto dan Bambang sumber sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro & Supomo, 2013). Data sekunder dapat berupa artikel dalam surat kabar atau majalah populer, buku, telaah gambar hidup, artikel dalam jurnal-jurnal ilmiah yang mengevaluasi atau mengkritisi sesuatu penelitian original yang lain, buletin statistik, arsip organisasi, laporan- laporan, publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasi atau tidak dipublikasi yang tersedia dari dalam maupun luar organisasi, analisis-analisis yang dibuat para ahli, basis data dari yang ada dari penelitian terdahulu, hasil survei terdahulu yang dipublikasi ataupun tidak, serta catatan-catatan perpustakaan (Silalahi, 2009).

Melalui pemaparan para ahli, peneliti akan mencari dan mengumpulkan data yang dianjurkan baik untuk mendapatkan data primer ataupun sekunder seperti yang telah disebutkan. Untuk mendapatkan data primer, peneliti berupaya mencari sumber utama tanpa melalui perantara. Untuk data sekunder, peneliti berupaya untuk mendapatkan data melalui studi kepustakaan, jurnal ilmiah, publikasi pemerintah atau perusahaan serta laporan yang berkaitan dengan pembuktian dukungan negara Kepulauan Pasifik terkhusus Vanuatu terhadap penentuan nasib sendiri Papua Barat dalam kajian konstruktivisme. Fase terpenting dalam proses penelitian adalah pengumpulan data-data yang diperlukan. Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, maka mustahil peneliti dapat menghasilkan temuan, apabila tidak memperoleh data.

Menurut Riduwan “teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data” (Riduwan, 2010). Djaman Satori dan Aan Komariah juga memaparkan pengertian teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dari pemaparan para ahli di atas dapat diketahui bahwa teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan tiga cara umum, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan untuk menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Pertama, Fathoni mengemukakan bahwa “wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai”. Suatu wawancara merupakan proses interaksi dalam komunikasi di mana sejumlah komponen memainkan peranan penting, karena komponen tersebut dapat memengaruhi dan menentukan hasil wawancara. Adapun komponen tersebut meliputi pewawancara, responden, materi wawancara dan hubungan antara pewawancara dengan responden (Abdurrahmat, 2006).

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas teknik wawancara secara langsung dan teknik wawancara secara tidak langsung. Menurut (Abdurrahmat, 2006) bahwa pendekatan wawancara dibedakan dalam dua macam yaitu, (1) wawancara langsung ialah wawancara yang dilakukan secara tatap muka. Dalam cara ini pewawancara langsung bertatap muka dengan pihak yang

diwawancara, dan (2) wawancara tidak langsung ialah yang dilakukan bukan secara bertatap muka melainkan melalui telepon, melalui radio, dan sebagainya.

Tabel 1.1. Sumber dan teknik pengumpulan data

Sumber data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek data
Primer	Wawancara	(a) Wawancara kepada unsur lembaga masyarakat: LIPI (Ibu Adriana Elisabeth) (b) Wawancara kepada unsur tokoh intelektual dan masyarakat: Rohaniawan dan Tokoh Intelektual Dr. Beny Giay.	(a) Data terkait jumlah korban orang Papua oleh operasi militer pada saat Pepera (b) Data terkait dimensi internasional kasus Papua. (c) Data terkait kondisi orang Papua sebagai objek kekerasan militer
Sekunder	Studi Kepustakaan	(a) Penelaahan dan pencatatan isi buku dan jurnal tentang operasi-operasi militer di Papua dari berbagai sumber	(a) Data terkait kekerasan-kekerasan militer di Papua

	Dokumentasi	(b) Penelaahan dan pencatatan isi <i>website</i> resmi dan sah di internet tentang kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat di wilayah Papua Barat	
--	-------------	--	--

Kedua, adapun teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan, menggali, mengkaji dan mempelajari sumber-sumber penulis yang telah terdokumentasikan baik berupa tulisan yaitu: makalah, laporan penelitian, dokumen kurikulum, jurnal, media massa, maupun yang berbentuk suara yaitu: rekaman suara, video, film. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikunto bahwa:

“Penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, atau lain-lain, dalam bentuk rekaman biasa dikenal dengan penelitian analisis dokumen atau analisis isi (content analysis)” (Arikunto, 2009).

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan maksud untuk memperkaya, mengembangkan dan menambah informasi guna memperkuat data-data yang diolah dan dijadikan hasil penelitian, dan lain-lain.

1.5.3. Teknik Validasi Data

Penelitian tidak lepas dari pencarian data-data untuk melengkapi dan memperkuat argumen peneliti dalam tulisannya. Akan tetapi, data yang digunakan dalam tulisan tidak dimasukan begitu saja. Pengujian terhadap data perlu dilakukan untuk diukur keabsahan, kesahihan, dan kepercayaan. Menurut Sugiyono teknik keabsahan data merupakan kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi (Sugiyono, 2006).

Data dikatakan valid atau tidak, penulis akan menggunakan triangulasi sumber yang memanfaatkan sumber jenis data yang berbeda guna menemukan kesamaan data hingga pada titik kevalidasian. Bagi peneliti teknik memvalidasi data dengan sumber mempermudah peneliti untuk mengukur akuratnya data yang diambil maupun yang telah diperoleh, apabila data-data mengenai dukungan negara-negara Pasifik terhadap keinginan Papua Barat untuk memisahkan diri dari Indonesia benar adanya dari berbagai sumber, maka data tersebut dikatakan valid.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2006). Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Miles & Huberman, 2005).

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drowing/verification* (Miles & Huberman, 2005). Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga tahap prosedur pengoalahan data antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Tahap penyajian data dilakukan berupa laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. Tahap verifikasi adalah proses untuk menemukan bukti-bukti aktual yang mendukung pengumpulan data.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas empat bab, dalam setiap terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang ada di penelitian ini. *Pertama*, pendahuluan pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dukungan negara-negara kepulauan Pasifik terkhusus Vanuatu terhadap penentuan nasib sendiri Papua Barat dalam kajian Post-kolonial serta pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. *Kedua*, kajian pustaka yang berisi tinjauan

pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen pertama. *Ketiga*, pembahasan pada bab ini mendeskripsikan dan menjelaskan keseluruhan bahasan tentang keinginan Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri dan didukung oleh negara-negara Pasifik terkhusus Vanuatu. *Keempat*, penutup bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi saran dan rekomendasi untuk pihak-pihak terkait mengenai dukungan Vanuatu.

